

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran .....	xiii
Daftar Istilah.....	xiv
Intisari .....	xvi
<i>Abstract</i> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Motivasi Penelitian.....	6
1.6 Kontribusi Penelitian .....	6
1.7 Ruang Lingkup dan Batasn Penelitian .....	7
1.8 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Dasar Hukum.....	10
2.2 Teori Keagenan .....	11
2.3 Tata Kelola Pemerintahan .....	12
2.4    Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	14
2.4.1 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	14
2.4.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
2.5 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website .....	20

2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Objek Penelitian .....	24
3.2 Pendekatan Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4 Analisis Data .....	30
3.5 Validitas Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	36
4.1.1 Tahap Perencanaan APBD .....	36
4.1.2 Tahap Pelaksanaan APBD.....	48
4.1.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.....	58
4.1.4. Kriteria Pengukuran .....	69
4.1.5 Pemingkatan dan Pengkategorian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	80
4.2 Karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah .....	91
4.2.1 Tingkat Kompetisi Politik .....	91
4.2.2 Ukuran Legislatif.....	94
4.2.3 Kompleksitas Pemerintah Daerah .....	96
4.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah .....	98
4.2.5 Kekayaan Pemerintah Daerah.....	100
4.2.6 Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat.....	103
4.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	105
4.2.8 Tingkat Kesejahteraan Daerah.....	107
4.2.9 Belanja Daerah.....	109
4.2.10 Press Visibility.....	112
4.3 Validitas Data .....	114
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
5.1 Simpulan.....	116
5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Pemda di Maluku, Maluku Utara, dan Pulau Sumatera.....	24
3.2 Indikator Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
3.3 Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
3.4 Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah .....	32
4.1 Indeks Transparansi Pada Tahap Perencanaan Pengeloaan Keuangan Daerah di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2017....	39
4.2 Indeks Transparansi Pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Regional Sumatera Tahun 2017 .....	40
4.3 Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Darah di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2017 .....	49
4.4 Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sumatera Tahun 2017 .....	50
4.5 Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2017...	60
4.6 Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah di Regional Sumatera Tahun 2017.....	61
4.7 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kriteria di Maluku dan Maluku Tenggara Tahun 2017.....	71
4.8 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kriteria di Regional Sumatera Tahun 2017 .....	72

4.9	Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2017 .....	81
4.10	Pemeringkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda di Regional Sumatera Tahun 2017 .....	82
4.11	Pengkategorian Tingkat Keterbukaan Informasi Anggaran Pemda di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2017 .....	87
4.12	Pengkategorian Tingkat Keterbukaan Informasi Anggaran Pemda di Regional Sumatera Tahun 2017 .....	88
4.13	Kompetisi Politik di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	92
4.14	Kompetisi Politik di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	93
4.15	Jumlah Anggota DPRD di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	94
4.16	Jumlah Anggota DPRD di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	95
4.17	Kompleksitas Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2017 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	97
4.20	Total Pendapatan Pemda di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	100
4.23	Perbandingan DAU dengan Total Pendapatan di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	104
4.24	Perbandingan DAU dengan Total Pendapatan di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	104

4.25	Indeks Pembangunan Manusia di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	106
4.26	Indeks Pembangunan Manusia di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	106
4.27	Tingkat Kesejahteraan Daerah di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	108
4.28	Tingkat Kesejahteraan Daerah di Regional Sumatera Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	108
4.29	Belanja Daerah di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	110
4.30	Belanja Daerah di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	111
4.31	<i>Press Visibility</i> di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	113
4.32	<i>Press Visibility</i> di Regional Sumatera Tahun 2016 Peringkat Tertinggi dan Terendah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	113
4.33	<i>Peer Review</i> dan Nama Pemda yang Direviu .....	115

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kertas Kerja Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Maluku dan Maluku Utara
2. Kertas Kerja Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Regional Sumatera

## DAFTAR ISTILAH

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
DAU	Dana Alokasi Umum
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-PPKD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
IBP	International Budget Partnership
IGI	Indonesia Governance Index
JO	Juncto
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
OBI	Open Budget Index
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PERDA	Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RENJA	Rencana Kerja
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-PPKD	Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
UU	Undang-Undang
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPAD	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah